

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

Pada bab IV ini penulis akan membahas gambaran umum konflik Sudan Selatan serta mediasi yang dilakukan oleh IGAD. Pembahasan dalam bab ini akan dimulai dengan sejarah awal konflik yang terjadi antara Sudan Utara dengan Sudan Selatan, yang terbagi menjadi tiga periode waktu yakni masa kolonialisme, perang sipil pertama (*Sudan's first civil war*), dan perang sipil kedua (*Sudan's second civil war*). Setelah membahas sejarah awal konflik antara Sudan Utara dengan Sudan Selatan, penulis kemudian akan membahas konflik Sudan Selatan secara spesifik, khususnya konflik antara dua aktor utama yakni Riek Machar dan Salva Kiir. Kemudian dalam bab ini penulis juga akan menjelaskan peran IGAD dalam memimpin mediasi sebagai upaya penyelesaian konflik Sudan Selatan.

#### **4.1 Konflik Sudan Utara – Sudan Selatan Pada Masa Kolonialisme (1820-1955)**

Sudan Selatan resmi menjadi negara merdeka pada tahun 2011 setelah resmi memutuskan untuk memisahkan diri dari Sudan melalui referendum. Konflik yang terjadi di Sudan Selatan pada tahun 2013 tidak terlepas dari konflik yang berlangsung antara Sudan bagian Utara dan Sudan bagian Selatan yang lebih dikenal *North-South conflict* saat kedua negara masih tergabung sebagai Sudan. Jika dilihat dari sisi sejarah sejak masa penjajahan (kolonialisme), Sudan bagian Utara dan bagian Selatan memang memiliki hubungan renggang dan kohesivitas yang rendah.

Perang sipil antara Sudan Utara dan Sudan Selatan telah berlangsung sejak masa pemerintah kolonialisme masih berkuasa di Sudan. Saat itu, Sudan dikuasai oleh tiga pemerintah kolonial berbeda diantaranya Turko-Egyptian, Mahdiya, dan Anglo-Egyptian.<sup>1</sup> Dalam masing-masing masa kepemimpinan pemerintah kolonial Sudan bagian utara dan selatan terlibat dalam berbagai jenis konflik, khususnya konflik yang berhubungan dengan perbedaan agama dan budaya.

Pada masa penjajahan Turko-Egyptian tahun 1820-1882, Sudan merupakan wilayah yang masyarakatnya beragam etnis dan agamanya.<sup>2</sup> Pemerintah kolonial Turko-Egyptian mulai melakukan penetrasi terhadap masyarakat di wilayah Sudan bagian Selatan yang beretnis non Arab dan beragama non Muslim. Kesenjangan antara wilayah Sudan bagian utara dan selatan juga sudah terlihat sejak saat itu, dimana saat itu pemerintah kolonial lebih banyak menguasai bagian utara. Akibatnya sebagian besar pembangunan dan perkembangan dilakukan di wilayah Sudan bagian utara.

Sebaliknya, perilaku pemerintah kolonial Turko-Egyptian terhadap masyarakat Sudan bagian Selatan cukup brutal.<sup>3</sup> Penguasa kolonial Turko-Egyptian melakukan praktik perdagangan budak kepada masyarakat di wilayah Sudan bagian selatan. Perbudakan merajalela pada masa kepemimpinan pemerintah kolonial Turko-Egyptian, khususnya di wilayah bagian selatan. Setelah muncul pemberontakan dari Mohammed Ahmed Sayyid Abdallah

---

<sup>1</sup>Girma Kebede, 1997, Sudan : The North-South Conflict in Historical Perspective, Diakses melalui <http://scholarworks.umass.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1095&context=cibs> pada tanggal 28 Desember 2017 pukul 22:27 WIB.

<sup>2</sup>*Ibid*, Hlm 3.

<sup>3</sup>*Ibid*

(Mahdi), kepemimpinan pemerintah kolonial Turko-Egyptian di wilayah Sudan berakhir pada tahun 1882.<sup>4</sup>

Meskipun sudah terlepas dari kepemimpinan pemerintah kolonial, penindasan terhadap masyarakat di wilayah Sudan bagian selatan tetap terjadi pada masa kepemimpinan Mahdi.<sup>5</sup> Pada masa kepimpinan Mahdi, perdagangan budak tetap berlangsung di wilayah Sudan bagian selatan bahkan menjadi semakin besar. Penindasan yang dilakukan tidak hanya sampai disitu saja, agama Islam dan bahasa Arab pun diterapkan secara paksa kepada masyarakat Sudan bagian selatan. Hukum Sharia juga menjadi hukum yang diterapkan di Sudan wilayah selatan.

Kemudian pada tahun 1898, masa kepimpinan Mahdi mengalami kejatuhan dan digantikan oleh kepemimpinan pemerintah kolonial Anglo-Egyptian.<sup>6</sup> Selama lebih dari setengah abad, Sudan menjadi koloni Inggris meskipun dikenal dengan nama Anglo-Egyptian Sudan. Pemerintah kolonial menetapkan batas-batas wilayah Sudan, melakukan pembangunan jalur kereta untuk kepentingan ekonomi dan perdagangan. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial pada saat itu lebih banyak dilakukan di wilayah utara-tengah Sudan, sementara pembangunan sangat minim dilakukan di wilayah selatan.

Secara resmi, pembagian wilayah utara dan selatan Sudan dilakukan pada tahun 1922.<sup>7</sup> Lebih tepatnya ketika pemerintah kolonial Inggris mengadopsi sistem administrasi terpisah. Wilayah Sudan bagian selatan terdiri dari tiga

---

<sup>4</sup>*Ibid.* Hlm 3.

<sup>5</sup>*Ibid.* Hlm 3.

<sup>6</sup>*Ibid.* Hlm 3.

<sup>7</sup>*Ibid.* Hlm 4.

provinsi yakni Equatoria, Bahr el Ghazal, dan *Upper Nile*.<sup>8</sup> Secara administratif, ketiga provinsi tersebut terpisah hingga tahun 1947 dan diabaikan pembangunan sosial dan ekonominya. Layanan kesehatan, sosial, pendidikan di wilayah selatan lebih banyak disediakan oleh misionaris kristen. Hal ini dikarenakan adanya *Southern Policy* yang membatasi pergerakan dan hubungan antara masyarakat utara dan selatan.<sup>9</sup> Pada saat ini, penyebaran agama Kristen dan bahasa Inggris gencar dilakukan oleh pemerintah kolonial Inggris. Pemisahan wilayah selatan dari wilayah utara dilakukan dengan tujuan untuk mencegah pengaruh Islam dan Arab menyebar.

Karena mendapatkan tekanan dari gerakan-gerakan nasionalis yang berkembang di wilayah utara, pemerintah kolonial Inggris kemudian menghapuskan *southern policy* satu dekade sebelum memberikan kemerdekaan bagi Sudan.<sup>10</sup> Bahasa Arab kemudian kembali dijadikan bahasa resmi menggantikan bahasa Inggris yang sebelumnya berusaha di penetrasi oleh pemerintah kolonial Inggris. Hal ini membuat masyarakat etnis Arab yang berasal dari wilayah utara kembali melakukan monopoli dalam berbagai aspek mulai dari keuangan, pendidikan dan keamanan. Sudan bagian utara yang sudah menyatu kembali goyah karena kembali munculnya ancaman dominasi dari masyarakat wilayah utara.

#### **4.2 Sudan's First Civil War (1955-1972)**

Kembali munculnya dominasi masyarakat wilayah utara terhadap masyarakat wilayah selatan kemudian memicu munculnya gerakan bersenjata separatis di wilayah bagian selatan. Salah satunya kemunculan gerakan *Equatoria Corps* di

---

<sup>8</sup>*Ibid*, Hlm 4

<sup>9</sup>*Ibid*, Hlm 4.

<sup>10</sup>*Ibid*, Hlm 4.

Torit pada tahun 1955. Akibat tidak adanya representasi dalam pemerintahan dan ketidakinginan masyarakat sudan bagian selatan menerima kebijakan pemerintah yang mengabaikan aspirasi masyarakat untuk mendapatkan perlakuan serta perlindungan yang setara, perang sipil antara kelompok pemberontak dengan pemerintah terus berlangsung sejak tahun 1955 hingga tahun 1971.<sup>11</sup>

Setelah *Equatoria Corps* di tahun 1955, kemudian muncul gerakan Anyanya pada tahun 1962. Meskipun banyak gerakan separatis yang muncul dari wilayah selatan, Islamisasi dan Arabisasi tetap gencar dilakukan oleh elit pemerintah wilayah utara. Khususnya ketika rezim kepemimpinan Abboud tahun 1958 hingga 1964. Bukan hanya perang sipil antara kelompok pemberontak dan pemerintah, sepanjang Januari 1956 hingga Juni 1989 Sudan juga mengalami banyak perubahan rezim pemerintahan.

Pada masa kepemimpinan Abboud terdapat kebijakan yang menggerus nilai, identitas, kultur dan budaya masyarakat di wilayah selatan Sudan. Pemerintah juga membenci dan merendahkan kepercayaan asli dan budaya masyarakat Sudan bagian selatan. Islamisasi dan Arabisasi dipaksakan oleh pemerintah bagi masyarakat di wilayah selatan, gerakan-gerakan yang menyebarkan ajaran Kristen juga dibatasi keberadaannya. Bahkan *Minister of Interior* Sudan secara terang-terangan mengatakan “ *Sudan is an Arab Country and whoever does not feel Arab should quit*”.<sup>12</sup> Hal ini kemudian membuat gerakan separatis dan pemberontak semakin banyak bermunculan di wilayah selatan. Salah satunya gerakan yang

---

<sup>11</sup>Luke L Fabiunke, 2013, *Mediation Outcomes From The Second Sudan Civil War: An Analysis Of Abuja And Igad Peace Initiatives*, Diakses melalui [https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/38925/13Dec\\_Fabiunke\\_Luke.pdf?sequence=1](https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/38925/13Dec_Fabiunke_Luke.pdf?sequence=1) pada tanggal 30 Desember 2017 pukul 20:59 WIB.

<sup>12</sup>*Ibid.*

dibentuk oleh letnan Josep Lagu pada akhir tahun 1960 yakni gerakan *Southern Sudan Liberation Movement*.

Pada tahun 1964, Abbud diturunkan dari kedudukannya dan dibentuklah *transitional national government*. Setelah itu pada tahun 1969, Jaafar Numeiri memimpin kudeta militer dan menduduki posisi kepresidenan hingga tahun 1985. Perang sipil antara kelompok pemberontak dan pemerintah tetap berlangsung sampai akhirnya Numeiri menegosiasikan status *self-governing* bagi wilayah selatan melalui *Addis Ababa Accord*. *Addis Ababa Accord* memberikan Sudan bagian selatan otoritas terbatas dalam hal pendidikan, pengembangan budaya, keuangan independen, dan jaminan kesempatan yang setara. Namun hal ini tidak berlangsung lama, sampai akhirnya Numeiri membatalkan *Addis Ababa Accord*, mengakhiri otonomi wilayah selatan dan mengimplementasikan *September Laws*. Hal inilah yang kemudian memicu berlangsungnya *Sudan's Second Civil War* pada tahun 1983.

Perang sipil antara Sudan Utara dan Sudan Selatan yang telah berlangsung hingga tahun 1972 dan menyebabkan 500.000 korban jiwa yang meninggal dunia.<sup>13</sup> Kesenjangan memang sejak awal sudah muncul antara Sudan Selatan dengan Sudan Utara, dimana Sudan Utara diberikan kekuasaan lebih besar oleh penjajah untuk menjadi negara merdeka sementara di sisi lain Sudan Selatan menjadi negara yang terbengkalai dan dipisahkan dari proses pengambilan keputusan. Kesenjangan ini yang juga kemudian memicu konflik Sudan Utara dan Sudan Selatan berlangsung kurang lebih selama 22 tahun.

---

<sup>13</sup>Anjana Varma. 2011. *The Creation of South Sudan : Prospects and Challenges*. Diakses melalui [http://cf.orfonline.org/wp-content/uploads/2011/12/OccasionalPaper\\_27.pdf](http://cf.orfonline.org/wp-content/uploads/2011/12/OccasionalPaper_27.pdf) pada tanggal 13 Desember 2017 pukul 23:50 WIB.

#### 4.3 Sudan's Second Civil War (1983-2005)

Perang sipil kedua di Sudan dimulai pada tahun 1983. Lebih tepatnya setelah tidak lagi berlakunya *Addis Ababa Accord* dan kembali diimplementasikannya *September Laws*. Setelah itu, Numeiri dicabut kedudukannya sebagai presiden. Setelah dicopotnya Numeiri, dibentuklah *Transitional Military Council* (TMC) dan terpilihnya Sadiq Al Mahdi sebagai presiden.<sup>14</sup> Terdapat potensi terciptanya perdamaian melalui *Koka Dam Declaration*, namun deklarasi ini mendapatkan pertentangan dari partai oposisi yakni NIF dan DUP (*Democratic Unionist Party*).

Usaha-usaha untuk mengakhiri perang sipil dan menciptakan perdamaian terus dilakukan. Salah satunya ketika partai DUP berusaha melakukan rekonsiliasi dengan SPLM/A melalui *Sudanese Peace Initiative* di tahun 1988. Usaha lain juga dilakukan oleh Mahdi dengan merancang perundang-undangan yang akan mencabut pemberlakuan hukum Islam. Namun rancangan ini mendapatkan penolakan, salah satu penolakan muncul dari kelompok partai NIF.

Pada bulan Juni 1989, Mahdi akhirnya dijatuhkan kedudukannya oleh Turabi, Bashir dan partai NIF.<sup>15</sup> Hal ini dilakukan karena mereka menyadari bahwa rezim kepemimpinan Mahdi ingin melakukan negosiasi perdamaian dengan SPLM/A. Bashir kemudian menggantikan posisi Mahdi sebagai pemimpin Sudan. John Garang menciptakan SPLM/A pada tahun 1983 dengan tujuan untuk melawan pemerintah Sudan (*Government of Sudan/GoS*) dan untuk mewujudkan Sudan yang baru, dimana didalamnya terdapat kesetaraan sosial, politik dan ekonomi.

Konflik yang terus berlangsung di Sudan kemudian menyita perhatian warga internasional. Beberapa diantaranya mencoba membantu melakukan penyelesaian

---

<sup>14</sup>John Young, 2007, *Sudan IGAD Peace Process : An Evaluation*, Diakses melalui [http://sudantribune.com/IMG/pdf/Igad\\_in\\_Sudan\\_Peace\\_Process.pdf](http://sudantribune.com/IMG/pdf/Igad_in_Sudan_Peace_Process.pdf) pada tanggal 8 Maret 2018 pukul 15:23 WIB.

<sup>15</sup>*Ibid*, Hlm 9.

konflik secara damai. Presiden Nigeria, Ibrahim Babangida melakukan usaha penyelesaian konflik melalui mediasi antara GoS dan SPLM/A yang dikenal dengan nama *Abuja Peace Conferences* dari tahun 1992 hingga 1993.<sup>16</sup> Usaha mediasi selanjutnya dilakukan oleh *Intergovernmental Authority on Development* (IGAD) dari tahun 1994-2001. Perundingan damai antara GoS dan SPLM/A mengalami jeda pada tahun 1994 dan tidak dilanjutkan kembali hingga tahun 1997. Setelah itu usaha mediasi dan perundingan damai antara kedua belah pihak yang berkonflik kembali dilakukan, hingga akhirnya pada tahun 2005 kedua belah pihak menandatangani *Comprehensive Peace Agreement* (CPA).

#### **4.4 Konflik Sudan Selatan**

Kemerdekaan Sudan Selatan secara resmi dideklarasikan pada tanggal 8 Juli 2011, didasarkan pada hasil referendum yang dilakukan enam bulan sebelumnya. Melalui referendum ini, 98,8% masyarakat Sudan bagian selatan ingin menjadi negara yang merdeka.<sup>17</sup> Keinginan masyarakat Sudan bagian selatan untuk merdeka tidak dapat dilepaskan dari sejarah perang sipil yang sudah berlangsung semenjak tahun 1956, lebih tepatnya setelah Sudan ditetapkan sebagai negara merdeka. Motif masyarakat Sudan bagian selatan untuk mendapatkan kemerdekaan dipicu oleh adanya marginalisasi terhadap masyarakat asli Sudan bagian selatan oleh pemerintah Sudan. Jauh sebelum 1956, marginalisasi memang sudah diterima oleh masyarakat Sudan Selatan. Bahkan saat masih dipimpin oleh pemerintah kolonial, marginalisasi terhadap masyarakat Sudan wilayah selatan sudah berlangsung.

---

<sup>16</sup>*Ibid.* Hlm 9

<sup>17</sup>Kateřina Rudincová, 2017, *Viability of a Secessionist State in Africa: Case Study of South Sudan*, Diakses melalui <https://acpo.vedeckecasopisy.cz/publicFiles/001458.pdf> pada tanggal 1 Januari 2017 pukul 23:17 WIB.



Awal mula konflik Sudan Selatan berlangsung pada bulan Desember tahun 2013 dimulai ketika Presiden Salva Kiir menuduh mantan wakil presiden Riek Machar merencanakan kudeta terhadap pemerintah. Konflik yang awalnya berlangsung di Juba kemudian menyebar dengan cepat ke wilayah-wilayah lain di Sudan Selatan. Pada awalnya konflik terjadi antara Salva Kiir dan Riek Machar semakin meluas dan berubah menjadi konflik antara etnis Nuer (kelompok pendukung Machar) dengan etnis Dinka (kelompok pendukung Kiir). Meskipun terdapat unsur etnis didalam konflik ini, konflik Sudan Selatan juga tidak dapat dengan mudah dikategorikan sebagai konflik etnis. Didalam konflik ini juga terdapat konflik politik, khususnya konflik politik yang terjadi antara para elit dalam partai SPLM (*Sudan's Party Liberation Movement*).

Sejak awal terbentuk pada tahun 1983, SPLM/A bukanlah kelompok yang homogen, melainkan gabungan dari kelompok-kelompok bersenjata berbagai etnis. Awalnya kelompok ini dibentuk oleh sekelompok siswa, cendekiawan dan mantan pasukan yang sebagian besar berasal dari etnis Dinka.<sup>18</sup> Kebanyakan orang-orang etnis Dinka ini berasal dari wilayah Upper Nile dan Bahr el-Ghazal yang pergi ke Ethiopia. Namun kemudian pada tahun 1988, kelompok militan etnis Nuer yang bernama Anyanya II bergabung kedalam kelompok ini.<sup>19</sup> Pada fase ini, SPLM/A terdiri dari tiga kelompok berbeda, yakni orang-orang Dinka yang berasal dari Bahr el-Ghazal, orang-orang Dinka yang berasal dari *eastern bank Nile*, dan orang-orang Nuer.<sup>20</sup> SPLM/A mengalami perluasan secara wilayah maupun etnis anggotanya. Meskipun demikian, kelompok SPLM/A tetap berada

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.*

di bawah pimpinan John Garang yang berasal dari faksi Dinka wilayah *eastern bank*.

Dalam perjalanan pergerakannya, SPLM/A sempat mengalami beberapa konflik politik dan perpecahan. Salah satu yang paling bersejarah terjadi pada tahun 1991 ketika Riek Machar bersama dengan Lam Akol meminta untuk mengganti John Garang dari posisinya sebagai pemimpin SPLM. Setelah usaha untuk menurunkan John Garang tidak berhasil dilakukan, kemudian terbentuklah faksi pemberontak didalam SPLM yang bernama SPLM-Nasir. Berbeda dengan SPLM yang dipimpin oleh Garang, SPLM-Nasir bukan hanya beraspirasi membentuk “*new sudan*” melainkan juga ingin membentuk Sudan Selatan yang merdeka. Adanya perselisihan dan perpecahan didalam kelompok SPLM ini memicu terjadinya konflik antara etnis Dinka dan Nuer. Konflik ini menyebabkan terjadinya pembunuhan massal terhadap kurang lebih 2000 orang etnis Dinka di wilayah Bor. SPLM-Nasir juga membentuk aliansi dengan *Sudanese Islamic Organisation* dan *National Islamic Front* yang juga didukung oleh rezim pemerintahan Ethiopia untuk melawan SPLM pimpinan John Garang.

Setelah Sudan Selatan menjadi negara merdeka SPLA tidak mengalami transformasi maupun reformasi, melainkan hanya mengalami penambahan jumlah anggota.<sup>21</sup> Setelah terbentuknya CPA dan Sudan Selatan merdeka pada tahun 2011, militan pendukung oposisi Kharotum yang kebanyakan berasal dari etnis Nuer diserap masuk kedalam SPLA. SPLM/A juga mengalami permasalahan terkait kepemimpinan. Setelah meninggalnya John Garang di tahun 2005, faksinya yang berasal dari *eastern bank of Nile* mengalami perpecahan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.*

Kekuasaan didalam SPLM/A kemudian mengalami pergeseran ke arah faksi Bahr el-Ghazal seiringan dengan posisi Salva Kiir sebagai presiden Sudan Selatan.

Adanya perpecahan dalam tubuh SPLM/A bahkan sejak awal dibentuk merupakan salah satu pemicu tidak langsung konflik yang terjadi di Sudan Selatan pada tahun 2013. Hal yang menjadi pemicu langsung dari konflik ini adalah perebutan kekuasaan dalam kubu pemerintahan Sudan Selatan. Hubungan antara aktor dalam pemerintahan Sudan Selatan sejak awal sudah memiliki konflik dan perbedaan. Sejak awal sudah terdapat perbedaan antara anggota partai SPLM, lebih tepatnya antara Salva Kiir selaku presiden dan Pagan Amum sebagai *Secretary General* SPLM. Bukan hanya dengan Pagan Amum, Salva Kiir juga berkonflik dengan wakil presiden saat itu Riek Machar.

Konflik antara Salva Kiir dan Riek Machar pada dasarnya sudah terlihat sejak tahun 1991.<sup>23</sup> Namun konflik dan perbedaan ini diabaikan begitu saja demi kesatuan partai pada masa *interim period* tahun 2005-2011.<sup>24</sup> Tensi antara keduanya pun semakin meningkat ketika pada tahun 2010 kedua aktor ini mendukung calon yang berbeda dan berlawanan dalam pemilihan gubernur beberapa negara bagian Sudan Selatan.<sup>25</sup> Tensi konflik antara keduanya memuncak ketika Riek Machar bersama dengan Pagan Amam dan Rebbeca Garang menyatakan keinginan mereka untuk mencalonkan diri sebagai ketua partai SPLM dan Presiden Sudan Selatan, menggeser posisi Salva Kiir. Setelah pernyataan ini, Kiir kemudian mencopot posisi wakil presiden yang dipegang oleh Riek Machar pada bulan April.<sup>26</sup> Tidak hanya mencopot posisi Riek Machar,

---

<sup>23</sup> Aziza Geleta Dessalegn. *Op.cit.* Hlm 17.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

Salva Kiir juga membubarkan kabinetnya dan mencabut posisi Machar bersama “sekutunya” dari pemerintahan pada bulan Juli 2013. Sampai akhirnya konflik memuncak pada bulan Desember tahun 2013.

#### **4.5 Mediasi IGAD dan IGAD Plus**

Seiring dengan berlangsungnya konflik di Sudan Selatan pada bulan Desember tahun 2013, perundingan damai dan usaha mediasi kemudian dilakukan oleh *Intergovernmental Authority on Development* (IGAD). Dalam 23rd *Extraordinary Summit of IGAD Heads of State and Government* yang diselenggarakan di Nairobi pada tanggal 27 Desember 2013, terpilihah tiga perwakilan *special envoys* untuk memimpin proses mediasi di Sudan Selatan.<sup>27</sup> Tiga perwakilan tersebut diantaranya Ambassador Seyoum Mesfin dari Ethiopia, General Lazaro Sumbeiywo dari Kenya dan General Mohammed Ahmed Moustafa El Dabi dari Sudan.

Mediasi yang dilakukan oleh IGAD menghasilkan beberapa kesepakatan salah satunya *Memorandum on the Cessation of Hostilities* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 23 Januari 2014. Namun kesepakatan ini terus-menerus dilanggar oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Terdapat kesepakatan lain yang dibentuk pada tanggal 9 Mei 2014, namun kesepakatan ini tetap tidak dapat membawa perdamaian bagi kedua belah pihak yang berkonflik.

Sampai akhirnya, *Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan* (ARCSS) ditandatangani oleh Pagan Amum dan Riek Machar di Addis Ababa pada tanggal 17 Agustus 2015.<sup>28</sup> Pada awalnya, Salva Kiir tidak ingin menandatangani ARCSS. Hal ini dikarenakan ia tidak setuju dengan

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>*Ibid.*

kesepakatan soal demiliterisasi dan penarikan pasukan dari Juba. Namun, karena adanya tekanan internasional ARCSS akhirnya ditandatangani oleh Salva Kiir pada tanggal 27 Agustus 2015.

Dalam tulisan ini proses mediasi IGAD akan dibagi kedalam tiga putaran. Putaran pertama, dimulai dari tanggal 3 Januari 2014 hingga 2 Februari 2014. Putaran kedua, dimulai dari tanggal 5 Februari 2014 hingga tanggal 10 Agustus 2014. Putaran ketiga dimulai pada bulan Juni 2015 oleh *IGAD Plus*.<sup>29</sup>

#### **4.5.1 Putaran Pertama (3 Januari 2014 – 2 Februari 2014)**

Mediasi IGAD dimulai pada tanggal 3 Januari 2014, dengan diselenggarakannya *proxy talks* antara kedua belah pihak yang berkonflik yakni pemerintah Sudan Selatan (*Government of South Sudan/GRSS*) dan pihak oposisi (SPLM-IO).<sup>30</sup> *Proxy talks* ini diselenggarakan di Addis Ababa Ethiopia. Kemudian proses mediasi dilanjutkan dengan negosiasi formal antara GRSS dan SPLM-IO. Negosiasi formal ini membahas dua agenda yakni tentang perjanjian *Cessation of Hostilities* (CoH) dan *Question of Detainees*.

Setelah itu, proses mediasi dilanjutkan dengan negosiasi langsung antara GRSS dan SPLM-IO pada tanggal 6 Januari 2014. Puncak dari proses mediasi IGAD putaran pertama ini adalah dengan ditandatanganinya perjanjian *Cessation of Hostilities* (CoH) oleh kedua belah pihak yang berkonflik pada tanggal 23 Januari 2014. Setelah penandatanganan CoH, duta besar Seyoum Mesfin

---

<sup>29</sup> IGAD South Sudan Special Envoys. Diakses melalui [http://southsudan.igad.int/attachments/article/248/01\\_23\\_2014\\_Press%20ReleaseSouth%20Sudanes%20Parties%20sign%20Agreements%20on%20the%20Cessation%20of%20Hostilities%20and%20Question%20of%20Detainees.pdf](http://southsudan.igad.int/attachments/article/248/01_23_2014_Press%20ReleaseSouth%20Sudanes%20Parties%20sign%20Agreements%20on%20the%20Cessation%20of%20Hostilities%20and%20Question%20of%20Detainees.pdf) pada tanggal 8 Maret 2018 pukul 15:42.

<sup>30</sup> *Timeline of Major Events IGAD-led Mediation Process for South Sudan*. Diakses melalui <http://southsudan.igad.int/index.php/about-us/timeline-of-events> pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 21:54 WIB.

menyatakan bahwa proses mediasi akan ditunda dari tanggal 24 Januari ke tanggal 7 Februari 2014.<sup>31</sup> Penundaan ini dilakukan untuk memberikan waktu bagi persiapan mekanisme-mekanisme sehubungan dengan mediasi seperti *Joint Technical Committee (JTC)*, *Monitoring and Verification Mechanism (MVM)*. Mekanisme-mekanisme tersebut dibuat untuk mengawasi serta memantau proses implementasi kesepakatan *Cessation of Hostilities (CoH)*.

Kemudian pada tanggal 2 Februari 2014, tim utama IGAD *Joint Technical Committee* berangkat menuju Juba untuk memulai proses *Monitoring and Verification Mechanism* untuk mengawasi proses implementasi kesepakatan *the Cessation of Hostilities (CoH)*.<sup>32</sup> Sejumlah empat belas anggota tim yang dipimpin oleh Mebrahtu dan Etinay bertemu dengan pemegang kepentingan serta aktor negara/non-negara di Sudan Selatan, termasuk didalamnya organisasi lokal dan internasional yang berlokasi di Juba serta wilayah-wilayah lain di Sudan Selatan. Tim ini juga akan melakukan penilaian terhadap situasi di Sudan Selatan sebelum penyebaran/penempatan *verification team* dilakukan di beberapa wilayah Sudan Selatan. Kunjungan ini berlangsung selama lima hari, kemudian tim akan kembali dan melapor pada IGAD *special envoys* di Addis Ababa pada tanggal 7 Februari 2014.

---

<sup>31</sup>*South Sudanese Parties sign Agreements on Cessation of Hostilities and Question of Detainees*. Diakses melalui [http://southsudan.igad.int/attachments/article/248/01\\_23\\_2014\\_Press%20Release-South%20Sudanese%20Parties%20sign%20Agreements%20on%20the%20Cessation%20of%20Hostilities%20and%20Question%20of%20Detainees.pdf](http://southsudan.igad.int/attachments/article/248/01_23_2014_Press%20Release-South%20Sudanese%20Parties%20sign%20Agreements%20on%20the%20Cessation%20of%20Hostilities%20and%20Question%20of%20Detainees.pdf) pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 22:01 WIB.

<sup>32</sup>*Advance IGAD Verification Team Heads for Juba*. Diakses melalui [http://southsudan.igad.int/attachments/article/247/02\\_02\\_2014\\_Press%20Release%20-%20on%20IGAD%20Advance%20Verification%20Team%20to%20Juba.pdf](http://southsudan.igad.int/attachments/article/247/02_02_2014_Press%20Release%20-%20on%20IGAD%20Advance%20Verification%20Team%20to%20Juba.pdf) pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 22:13 WIB.

#### 4.5.2 Putaran Kedua (5 Februari 2014 – 10 Agustus 2014)

Pada tanggal 5 Februari 2014, mediasi IGAD putaran kedua diselenggarakan di Addis Ababa.<sup>33</sup> Mediasi putaran kedua ini akan berfokus pada dialog politik antara kedua belah pihak yang berkonflik. Segera setelah dilaksanakannya *24th Extraordinary Session IGAD Summit, special envoys* melibatkan diri untuk mengimplementasi keputusan *Assembly of IGAD Heads of State and Government*. *Special envoys* mengirimkan undangan kepada pihak-pihak yang terlibat konflik perihal permulaan putaran kedua negosiasi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2014 di Addis Ababa. Mediasi putaran kedua akan fokus pada dialog politik dan rekonsiliasi nasional di Sudan Selatan.

Selain itu *the envoys* juga menemui 7 mantan *detainees* yang dibebaskan dan kemudian menanyakan pendapat mereka tentang mediasi putaran selanjutnya.<sup>34</sup> Para *detainees* mengapresiasi upaya *the envoys* terutama dengan ditandatanganinya *Cessation of Hostilities Agreement*. Tujuh *detainees* yang dibebaskan ini kemudian juga turut diundang dalam *political process* pada mediasi putaran kedua. Pada putaran kedua ini, *the envoys* akan berdiskusi dengan kedua belah pihak yang berkonflik, yakni dengan Presiden Salva Kiir beserta anggota pemerintah Sudan Selatan lainnya dan pihak oposisi yakni Riek Machar.

Selama mediasi putaran kedua dilakukan, konflik masih terus berlangsung di beberapa wilayah Sudan Selatan seperti *Upper Nile*, *Jonglei*, *Warrap* dan *Unity States*.<sup>35</sup> Dengan kembali berlangsungnya konflik, *the envoys* menyayangkan

---

<sup>33</sup> *IGAD Special Envoys Spearhead The Start Of The Political Process In South Sudan*. Diakses melalui [http://southsudan.igad.int/attachments/article/246/02\\_05\\_2014\\_Statement%20IGAD\\_Special%20Envoys\\_SS\\_Political\\_Process.pdf](http://southsudan.igad.int/attachments/article/246/02_05_2014_Statement%20IGAD_Special%20Envoys_SS_Political_Process.pdf) pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 22:19 WIB.

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> *IGAD Special Envoys express serious concerns over reports of continued fighting in the Republic of South Sudan*. Diakses melalui

pelanggaran terhadap perjanjian *Cessation of Hostilities Agreement* yang dilakukan kedua belah pihak. Pelanggaran ini hanya akan merusak proses mediasi yang sedang berlangsung dan memburuk penderitaan yang dialami oleh masyarakat Sudan Selatan.

Oleh karena itu, *special envoys* mendorong dengan kuat para pihak yang berkonflik untuk menaati *the Cessation of Hostilities Agreement* dan melanjutkan komitmen mereka untuk melanjutkan proses mediasi, mengingat bahwa krisis yang terjadi di Sudan Selatan tidak dapat diselesaikan melalui cara militer dan lebih mungkin untuk diselesaikan melalui dialog politik.<sup>36</sup> *The envoys* juga mengajak pihak-pihak yang berkonflik untuk lebih bekerjasama untuk mempercepat operasionalisasi *Monitoring and Verification Mechanism* sesuai dengan perjanjian *the Cessation of Hostilities Agreement*.

*Special envoys* kemudian juga mengajukan permohonan kepada negara-negara yang berkontribusi dalam *Joint Technical Committee (JTC)* dan *Monitoring and Verification Team (MVT)* untuk mengirimkan perwakilan mereka dalam beberapa hari kedepan. Selain itu *special envoys* juga mengajukan permintaan dukungan logistik yang diperlukan untuk operasionalisasi MVM kepada mitra IGAD.

Perundingan damai antara kedua belah pihak yang berkonflik di Sudan Selatan dan IGAD *special envoys* kembali diselenggarakan pada tanggal 3 Maret 2014.<sup>37</sup> Sebelum melanjutkan perundingan dan dialog politik antara kedua belah

---

[http://southsudan.igad.int/attachments/article/245/02\\_19\\_2014\\_Press%20Release-%20IGAD%20Special%20Envoys%20express%20concern%20over%20reports%20of%20continued%20fighting%20in%20South%20Sudan.pdf](http://southsudan.igad.int/attachments/article/245/02_19_2014_Press%20Release-%20IGAD%20Special%20Envoys%20express%20concern%20over%20reports%20of%20continued%20fighting%20in%20South%20Sudan.pdf) pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 22:23 WIB.

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>*IGAD Special Envoys to South Sudan peace Dialogue 3rd March 2014*. Diakses melalui [http://southsudan.igad.int/attachments/article/244/03\\_03\\_2014\\_Press%20Release%20-%20](http://southsudan.igad.int/attachments/article/244/03_03_2014_Press%20Release%20-%20)



pihak yang berkonflik, serangkaian *shuttle diplomacy* dilakukan oleh *special envoys* melibatkan pihak yang berkonflik bersama dengan pemegang kepentingan lainnya. Salah satunya misi *shuttle diplomacy* bagi Presiden Salva Kiir dan wakil presiden Riek Machar.

Selain *shuttle diplomacy the envoys* juga melakukan pertemuan dengan pimpinan SPLM (mantan *detainees* SPLM) dan pemangku kepentingan lainnya termasuk kelompok wanita, kelompok pemuda, kelompok religius.<sup>38</sup> Pertemuan ini dilakukan dengan maksud untuk memastikan luasnya konsultasi yang dilakukan. Misi *shuttle diplomacy* ini memberi kesempatan untuk mengembangkan kerangka yang akan digunakan dalam proses negosiasi.

Melalui perundingan dan dialog politik ini, para peserta yang terlibat membuat kemajuan dengan dihasilkannya *declaration of principles*.<sup>39</sup> *Declaration of principles* akan memandu pelaksanaan proses mediasi putaran kedua dan menjadi dasar bagi perdamaian yang berkelanjutan. Selain *shuttle diplomacy*, *special envoys* juga melakukan pertemuan dengan ketua SPLM (kelompok oposisi) dan presiden Sudan Selatan (Salva Kiir) bersama dengan para anggota Politburo lainnya pada tanggal 1 Maret 2014.

Konsultasi juga dilakukan oleh *special envoys* bersama dengan SPLM/A dan pemimpin SPLM di Addis Ababa.<sup>40</sup> Konsultasi ini dilangsungkan karena dibutuhkan dialog intra-SPLM. Kontribusi positif yang diperoleh melalui dialog ini diharapkan dapat memperluas dialog politik dan proses rekonsiliasi di Sudan Selatan. Tim kepemimpinan SPLM juga akan segera mengadakan

---

%20IGAD%20Special%20Envoys%20on%20the%20S%20Sudan%20Peace%20Dialogue.pdf  
pada tanggal 23:00 WIB.

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>*Ibid.*

pertemuan di Addis Ababa, Ethiopia untuk mengembangkan agenda, modalitas dan kerangka waktu untuk *review* dan *self assessment* SPLM.

Mediasi IGAD putaran kedua ini juga diselengi dengan diselenggarakannya IGAD *extraordinary summit* yang ke 25 pada tanggal 13 Maret 2014 di Addis Ababa.<sup>41</sup> Pertemuan ini diselenggarakan untuk membahas kondisi yang sedang berlangsung di Sudan Selatan. Pada mediasi putaran kedua ini, *special envoys* melakukan penundaan diskusi hingga tanggal 20 Maret 2014.<sup>42</sup> Masa penundaan sekaligus istirahat ini akan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak berkonflik untuk dapat merefleksikan dan mengkonsultasikan dokumen panduan proses mediasi (*declaration of principles*).

Masa istirahat ini juga akan memberikan kesempatan bagi *the envoys* untuk mendengarkan pendapat masyarakat serta memastikan pandangan mereka terefleksikan dalam *declaration of principles* dan dalam kerangka dialog. Berkaitan dengan hal ini, IGAD *special envoys* bersama dengan mitra IGAD akan menyelenggarakan konferensi bersama dengan masyarakat di Addis Ababa selama minggu kedua bulan Maret 2014.

Para pihak yang berkonflik membuat kemajuan penting terkait operasionalisasi MVM yang ditetapkan pada tanggal 23 Januari 2014.<sup>43</sup> Pendanaan operasi MVM sudah diamankan, dan tim sudah melakukan perjalanan ke semua wilayah yang direncanakan untuk dilakukan operasi. Pihak-pihak yang berkonflik juga sudah menunjuk perwakilan untuk menghadiri MVM. IGAD dan mitranya juga akan mengirimkan perwakilan untuk berpartisipasi dalam operasi monitoring.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

Pihak oposisi (SPLM/A) juga sudah menandatangani *implementation modalities* untuk mendukung perjanjian *Cessation of Hostilities* (CoH). Perjanjian ini sudah terlebih dahulu ditandatangani oleh pihak pemerintah Sudan Selatan (GRSS) pada tanggal 24 Februari 2014 di Addis Ababa.<sup>44</sup> Selain perjanjian *Cessation of Hostilities* (CoH), dokumen *implementation modalities* juga disiapkan oleh tim *Joint Technical Committee* (JTC).

Lebih lanjut, sebagai bagian dari MVM ketua *IGAD Heads of State Chairperson* dan PM Haile Mariam beserta *IGAD special envoys* melakukan konsultasi bersama dengan pemimpin negara di kawasan Afrika Timur, bersama Uni Afrika (AU), UN, dan mitra IGAD lainnya terkait penyebaran kekuatan proteksi dan stabilisasi wilayah regional.<sup>45</sup> JTC menyiapkan semua pengaturan yang diperlukan untuk melakukan penyebaran MVTs secara cepat. Sehubungan dengan perkembangan yang terjadi di Sudan Selatan, *special envoys* juga mengusulkan penyelenggaraan KTT luar biasa IGAD. KTT ini diadakan untuk menilai prestasi yang telah dibuat sejauh ini dan memberikan arahan lebih lanjut.

Kemudian tanggal 25 Maret 2014, mediasi Sudan Selatan putaran kedua yang sempat ditunda pada tanggal 3 Maret 2014 kembali dilanjutkan menyusul kedatangan para pihak yang berkonflik di Addis Ababa.<sup>46</sup> Dalam proses mediasi ini, *IGAD special envoys* berkonsultasi dengan para pihak yang berkonflik mengenai dialog politik menuju rekonsiliasi nasional dan perbaikan keadaan di Sudan Selatan. Sementara itu, sejalan dengan CoH dan *Implementation Modalities*

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>*Ibid.*

<sup>46</sup>*Phase II of the IGAD-led South Sudan Peace Process resumes in Addis Ababa.* Diakses melalui [http://southsudan.igad.int/attachments/article/243/03\\_25\\_2014\\_Press%20Release%20-%20Resumption%20of%20Phase%20II%20of%20South%20Sudan%20Mediation%20Process.pdf](http://southsudan.igad.int/attachments/article/243/03_25_2014_Press%20Release%20-%20Resumption%20of%20Phase%20II%20of%20South%20Sudan%20Mediation%20Process.pdf) pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 23:05 WIB.

yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak berkonflik sedang dalam proses operasionalisasi MVM dan penempatan tim MVT serta MVM *Protection Force* (PF).

IGAD *special envoys* prihatin atas konflik yang terus berlanjut di Sudan Selatan, dan adanya pelanggaran terhadap perjanjian CoH yang dilakukan oleh para pihak yang berkonflik. *The envoys* kemudian kembali mengulangi seruan mereka terhadap para pihak yang menandatangani perjanjian untuk mematuhi CoH dan bekerjasama secara penuh dengan JTC guna operasionalisasi MVM. *Special envoys* juga mendesak masyarakat internasional untuk memberikan tekanan kepada kedua belah pihak yang berkonflik untuk menghentikan perang.

Mengingat adanya kekhawatiran soal kemanusiaan yang serius di lokasi konflik dan adanya permintaan dari lembaga pemberi bantuan di Sudan Selatan, *the envoys* meminta para pihak yang berkonflik untuk memastikan akses yang bebas terhadap layanan kemanusiaan bagi warga yang terkena dampak konflik; dan mendorong para pihak yang berkonflik menghormati komitmen mereka untuk membuka koridor bantuan yang masuk ke Sudan Selatan.

Selanjutnya pada tanggal 1 dan 5 April 2014, tim MVM pertama ditempatkan di wilayah Bor dan Bentiu.<sup>47</sup> Selain di wilayah Bor dan Bentiu tim MVM juga akan ditempatkan di wilayah-wilayah Sudan Selatan lainnya, salah satunya di Malakal (*Upper Nile State*) yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 15 April. Selain itu juga terdapat rencana untuk menyebarkan tim-tim ke wilayah lainnya seperti Nassir, Akono dan lainnya dalam jangka waktu pendek.

---

<sup>47</sup>IGAD *Monitoring and Verification Teams commence operations in South Sudan*. Diakses melalui [http://southsudan.igad.int/attachments/article/239/04\\_11\\_2014\\_Press%20release%20MVM%20team%20Commence%20operations%20in%20South%20Sudan.pdf](http://southsudan.igad.int/attachments/article/239/04_11_2014_Press%20release%20MVM%20team%20Commence%20operations%20in%20South%20Sudan.pdf) pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 0:47 WIB.

Tim ini dikoordinasikan melalui MVM yang dibentuk dan diatur dalam perjanjian CoH dan diawasi oleh JTC (*Joint Technical Committee*).

JTC terdiri dari perwakilan pihak yang berkonflik, negara anggota IGAD, Uni Afrika, UN, dan mitra-mitra IGAD. Komite ini bermarkas di Juba dan melaporkan langsung kepada IGAD *special envoys* yang memimpin proses mediasi IGAD di Sudan Selatan. JTC dan MVT akan melaksanakan mandat mereka sesuai dengan perjanjian CoH. Dimana mandat mereka diantaranya menilai, memantau, menginvestigasi, memverifikasi, dan melaporkan dugaan pelanggaran terhadap perjanjian CoH yang diajukan oleh para pihak berkonflik, otoritas masyarakat, kelompok, dan sumber lainnya.

Selain penempatan tim MVM di wilayah Bentiu, pada tanggal 5 April 2014 pertemuan tim anggota SPLM Politburo dilaksanakan di Addis Ababa.<sup>48</sup> Pertemuan ini dihadiri oleh H.E Hailemariam Dessalegn, PM Ethiopia dan ketua IGAD *Assembly*, untuk mempersiapkan dasar bagi SPLM *Leadership Review and Self Assessment Forum*. *SPLM Leadership Review and Self Assessment Forum* diinisiasikan dalam kerangka mediasi IGAD dan diharapkan berjalan bersamaan serta memberikan kontribusi pada dialog politik menuju rekonsiliasi dan pemulihan konflik di Sudan Selatan.

Pertemuan tim ini akan mengembangkan agenda, modalitas, dan kerangka waktu serta akan membahas penyebab krisis yang saat ini terjadi di Sudan Selatan. Forum dialog internal SPLM akan difasilitasi oleh representasi dari *Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front* (EPRDF) dan *African*

---

<sup>48</sup>An advance team of SPLM Politburo members convenes in preparation for the SPLM Leadership Review and Self-Assessment Forum. Diakses melalui [http://southsudan.igad.int/attachments/article/242/04\\_05\\_2014\\_Press%20Release%20-%20Launch%20of%20SPLM%20intra-Party%20Dialogue%20Forum.pdf](http://southsudan.igad.int/attachments/article/242/04_05_2014_Press%20Release%20-%20Launch%20of%20SPLM%20intra-Party%20Dialogue%20Forum.pdf) pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 0:50 WIB.

*National Congress* (ANC) mengingat pengalaman mereka yang relevan dengan krisis saat ini di dalam SPLM.

Ditengah berlangsungnya mediasi IGAD putaran kedua, konflik serta pertikaian tetap berlangsung di Sudan Selatan. Pada tanggal 17 April 2014 terjadi peristiwa serangan terhadap markas UNMISS di wilayah Bor.<sup>49</sup> Bukan hanya itu, situasi kemanusiaan di Sudan Selatan juga semakin memburuk dengan adanya penargetan serta penyerangan terhadap masyarakat sipil dalam konflik-konflik yang terjadi. Selain serangan yang terjadi di wilayah Bor, konflik juga terjadi di wilayah Bentiu (*Unity State*). Peristiwa ini tentu saja merupakan bentuk pelanggaran berat terhadap komitmen yang telah dibuat oleh pemerintah Sudan Selatan (GRSS) dan pihak oposisi (SPLM/A) dalam perjanjian CoH.

Serangan dan konflik tersebut menelan korban 200 masyarakat sipil dan korban luka-luka sebanyak 400 jiwa. Jumlah ini hanyalah jumlah korban satu kali serangan di sebuah masjid di Bentiu yang terjadi pada tanggal 15 April 2014. Serangan 17 April yang dilakukan di Bor juga menelan korban masyarakat sipil, diantaranya 40 orang meninggal dan korban luka-luka lebih dari 70 jiwa. Menanggapi peristiwa ini, *executive secretary* IGAD meminta kepada para pihak yang berkonflik untuk menghormati komitmen yang sudah mereka buat dalam CoH termasuk komitmen untuk memastikan perlindungan terhadap masyarakat sipil. *Executive secretary* IGAD juga mengajak masyarakat internasional untuk memberikan tekanan kepada kedua belah pihak supaya mau menghentikan

---

<sup>49</sup>*IGAD Deeply concerned by spiraling violent across South Sudan and Strongly Condemns Deliberate Targeting Civilians.* Diakses melalui [http://southsudan.igad.int/attachments/article/238/04\\_24\\_2014\\_Press%20Release%20on%20the%20Recent%20Developments%20in%20South%20Sudan.pdf](http://southsudan.igad.int/attachments/article/238/04_24_2014_Press%20Release%20on%20the%20Recent%20Developments%20in%20South%20Sudan.pdf) pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 1:06 WIB.

konflik. Hal ini dilakukan guna mencegah konflik yang lebih parah terjadi di Sudan Selatan.

Ditengah konflik yang terjadi, proses mediasi IGAD di Sudan Selatan tetap berlanjut. Anggota *political bureau* SPLM diberikan mandat untuk melakukan persiapan dialog intra-kelompok di Addis Ababa.<sup>50</sup> Persiapan ini juga diikuti oleh pemerintah Ethiopia dan difasilitasi oleh *African National Congress* (ANC) dan EPRDF. Pertemuan ini dilaksanakan sejak tanggal 23 April 2016 hingga 26 April 2014. Terdapat beberapa hal yang dicapai dalam pertemuan ini diantaranya tujuan dari dilaksanakannya *intra party dialogue*, agenda yang didiskusikan oleh *Political Bureau*, aturan untuk ikut serta dalam *intra-party dialogue*, dan keberlanjutan diskusi perihal isu yang tersisa.

Mediasi IGAD putaran kedua di Sudan Selatan kembali dilanjutkan dengan sesi ketiga yang rencananya akan dilangsungkan pada tanggal 28 April 2014.<sup>51</sup> Sesi ketiga ini fokus pada pelaksanaan dialog politik untuk rekonsiliasi dan pemulihan nasional. Sesi ini dihadiri oleh kedua belah pihak yang berkonflik dan kembali dilaksanakan setelah sebelumnya di tunda pada tanggal 7 April 2014. Selama penundaan dilakukan, IGAD *special envoys* melakukan banyak konsultasi dengan pemimpin masing-masing pihak yang berkonflik, diantaranya dengan presiden Sudan Selatan Salva Kiir dan mantan wakil presiden Sudan Selatan yang juga merupakan pemimpin dari kelompok SPLM/A Riek Machar.

---

<sup>50</sup>*Press Statement by the Joint Preparatory Committee for the SPLM Intra Party Dialogue*. Diakses melalui [http://southsudan.igad.int/attachments/article/237/04\\_25\\_2014\\_Press%20Statement%20%20by%20joint%20p.com%20for%20Intra-party%20dialogue.pdf](http://southsudan.igad.int/attachments/article/237/04_25_2014_Press%20Statement%20%20by%20joint%20p.com%20for%20Intra-party%20dialogue.pdf) pada tanggal 11 Juni 2018 pukul 1:10 WIB.

<sup>51</sup>*Phase II of IGAD-LED South Sudan Talks Resume in Addis Ababa*. Diakses melalui [http://southsudan.igad.int/attachments/article/236/04\\_28\\_2014\\_Press%20Release%20--%20on%20resumption%20of%20Phase%20two%20of%20S.%20Sudan%20peace%20talks.pdf](http://southsudan.igad.int/attachments/article/236/04_28_2014_Press%20Release%20--%20on%20resumption%20of%20Phase%20two%20of%20S.%20Sudan%20peace%20talks.pdf) pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 1:12 WIB

Konsultasi ini dilakukan untuk mempercepat proses mediasi dan mencegah terjadinya eskalasi kembali di masa mendatang. Pada saat konsultasi dilakukan kedua belah pihak menunjukkan perhatiannya soal eskalasi yang terjadi baru-baru ini dan menunjukkan komitmen baru mereka terhadap proses mediasi.

*Special envoys* juga melakukan serangkaian konsultasi dengan pemimpin-pemimpin negara anggota IGAD dan juga dengan AU, UN serta mitra IGAD lainnya. Konsultasi ini dilakukan untuk memobilisasi dukungan bagi proses mediasi dan membuat operasi MVM berjalan tanpa hambatan. Selain itu konsultasi ini juga bertujuan untuk mempercepat pengerahan pasukan *Protection Force*.

Sehubungan dengan konflik yang berlangsung di Sudan Selatan dan pelanggaran terhadap perjanjian *Cessation of Hostilities* (CoH) yang dilakukan oleh kedua belah pihak, pada tanggal 5 Mei 2014 pemerintah Sudan Selatan (GRSS) dan SPLM/A menandatangani rekomitmen kesepakatan *Cessation of Hostilities*.<sup>52</sup> Didalam rekomitmen ini kedua belah pihak juga mendeklarasikan masa tenang selama 30 hari (*30 days of tranquility*). Observasi “*days of tranquility*” dilakukan mulai dari tanggal 7 Mei 2014. *Days of tranquility* dilakukan untuk memungkinkan masyarakat Sudan Selatan menyiapkan kebutuhan mereka seperti melakukan penanaman tanaman untuk kebutuhan pangan, merawat hewan ternak, dan pindah ke tempat yang lebih aman.

Kemudian pada tanggal 9 Mei 2014, Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir Mayardit melakukan pertemuan dengan Riek Machar mantan wakil presiden

---

<sup>52</sup>*Principals of South Sudan Parties to meet in Addis Ababa*. Diakses melalui [http://southsudan.igad.int/attachments/article/235/05\\_06\\_2014\\_Press%20Release%20-%20IGAD%20Special%20Envoys.pdf](http://southsudan.igad.int/attachments/article/235/05_06_2014_Press%20Release%20-%20IGAD%20Special%20Envoys.pdf) pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 1:16 WIB.



Sudan Selatan di Addis Ababa.<sup>53</sup> Pertemuan ini merupakan pertemuan tatap muka pertama antara kedua tokoh ini semenjak pecahnya konflik di Sudan Selatan pada tanggal 15 Desember 2013. Pada pertemuan ini, Presiden Salva Kiir dan mantan presiden Riek Machar menandatangani sebuah kesepakatan penting untuk mengakhiri konflik di Sudan Selatan. Perjanjian yang ditandatangani oleh kedua tokoh ini berisi komitmen untuk menghentikan permusuhan yang terjadi dalam kurun waktu 24 jam setelah penandatanganan dilakukan. Selain itu perjanjian juga berisi rededikasi kepada perjanjian CoH yang ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 23 Januari 2014 di Addis Ababa. Kedua tokoh juga berkomitmen untuk membekukan kekuatannya di lokasi konflik saat ini dan menahan diri dari tindakan yang sifatnya provokatif atau melakukan pertempuran sampai disetujuinya gencatan senjata yang bersifat permanen.

Dalam perjanjian ini, kedua belah pihak juga sudah berkomitmen untuk bekerjasama tanpa syarat dalam operasionalisasi penuh MVM dan memfasilitasi akses kemanusiaan ke semua masyarakat Sudan Selatan yang terkena dampak konflik. Sebagai tambahan, kedua belah pihak juga sepakat untuk bekerjasama dalam membentuk pemerintah transisi (TgoNU).

TgoNU akan bertugas untuk mengawasi fungsi pemerintahan selama masa transisi; mengimplementasikan reformasi kritis yang sudah dinegosiasikan melalui proses perdamaian; memantau proses konstitusional dan membimbing Sudan Selatan ke arah penyelenggaraan pemilihan baru. Ketentuan terkait pemerintah transisi akan dinegosiasikan melalui proses perdamaian yang dipimpin

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

oleh IGAD. Kedua pemimpin akan mengadakan pertemuan tindak lanjut dalam waktu satu bulan dibawah pengawasan IGAD.

Mediasi IGAD putaran kedua yang pada awalnya direncanakan akan berlangsung pada tanggal 28 April ditunda selama 12 hari.<sup>54</sup> Pada sesi ketiga putaran kedua ini, mediasi akan membahas dialog politik untuk proses rekonsiliasi dan pemulihan nasional. Selain menandatangani perjanjian *recommitment on the humanitarian matters in CoH* kedua belah pihak juga membentuk dua *working committee* yakni *Security Arrangements and Humanitarian Affairs Committee* dan *Political Committee*. Dua komite ini telah membuat dokumen terkait implementasi CoH dan kerangka untuk proses negosiasi politik. Selama masa penundaan, IGAD *special envoys* melakukan *shuttle mission* ke Sudan Selatan dan melakukan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Pada tanggal 7 Juni 2014, IGAD *special envoys* menyelenggarakan *multi-stakeholder symposium* di Addis Ababa.<sup>55</sup> Simposium ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan di Sudan Selatan untuk memprakarsai fase inklusif proses perdamaian di Sudan Selatan. Simposium ini dihadiri oleh lebih dari 250 orang dari Sudan Selatan yang mewakili pemerintah, oposisi, partai politik, kelompok berbasis agama, dan organisasi masyarakat. Pada simposium ini para ahli internasional menampilkan presentasi yang menawarkan solusi terkait pemerintahan transisi, institusi sementara, keadilan, rekonsiliasi, keamanan, pembangunan konstitusi, dan reformasi. Kemudian peserta secara informal

---

<sup>54</sup>*Phase II of the IGAD-led South Sudan Peace Talk Adjourn for twelve days*. Diakses melalui [http://southsudan.igad.int/attachments/article/233/05\\_19\\_2014\\_Press%20Release%20-%20Phase%20II%20of%20the%20IGAD-led%20SS%20Ajourn%20for%20Twelve%20days.pdf](http://southsudan.igad.int/attachments/article/233/05_19_2014_Press%20Release%20-%20Phase%20II%20of%20the%20IGAD-led%20SS%20Ajourn%20for%20Twelve%20days.pdf) pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 1:19 WIB.

<sup>55</sup>*Inclusive peace process for South Sudan Begins : Symposium a Success*. Diakses melalui [http://southsudan.igad.int/attachments/article/232/06\\_07\\_2014\\_Press%20Release%20-%20%20Inclusive%20Peace%20Process%20for%20South%20Sudan%20launched.pdf](http://southsudan.igad.int/attachments/article/232/06_07_2014_Press%20Release%20-%20%20Inclusive%20Peace%20Process%20for%20South%20Sudan%20launched.pdf) pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 1:21 WIB

mendiskusikan masalah dengan para ahli di bidangnya untuk menambah pemahaman terkait isu tersebut.

Setelah pelaksanaan simposium, proses mediasi IGAD di Sudan Selatan kembali dilanjutkan dengan penyelenggaraan 26th IGAD *extraordinary summit meeting* pada tanggal 10 Juni 2014 di Addis Ababa. Sidang luar biasa ini diselenggarakan untuk membahas kondisi konflik yang sedang berlangsung di Sudan Selatan. Bersamaan dengan pertemuan tersebut, Salva Kiir dan Riek Machar juga melakukan pertemuan. Dalam sidang luar biasa ini Salva Kiir dan Riek Machar membuat komitmen untuk mempercepat dialog dalam rangka pembentukan TgoNU dalam waktu 60 hari.

Perundingan negosiasi kembali dilanjutkan dengan diselenggarakannya *multi-stakeholder roundtable* pada tanggal 20 Juni 2014 di Addis Ababa.<sup>56</sup> Perundingan ini menghadirkan banyak pemegang kepentingan di Sudan Selatan. Proses perundingan dilaksanakan dengan format partisipatif dan *round-table* sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada tanggal 9 Mei 2014 untuk menyelesaikan krisis di Sudan Selatan. Dalam perundingan ini, delegasi pemimpin SPLM dan perwakilan dari partai politik, masyarakat sipil dan organisasi berbasis agama juga akan dilibatkan. Namun, pihak oposisi SPLM/A gagal menghadiri perundingan *multi-stakeholder* ini.

Setelah diselenggarakannya *multi-stakeholder roundtable*, perundingan perdamaian yang dipimpin oleh IGAD untuk menangani konflik di Sudan Selatan

---

<sup>56</sup>*Inclusive negotiations for South Sudan launched: Stakeholders to discuss security and transnational government arrangements.* Diakses melalui [http://southsudan.igad.int/attachments/article/217/06\\_20\\_2014\\_Press%20Release%20-%20Multi-stakeholders%20roundtable%20negotiations%20launched.pdf](http://southsudan.igad.int/attachments/article/217/06_20_2014_Press%20Release%20-%20Multi-stakeholders%20roundtable%20negotiations%20launched.pdf) pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 1:22 WIB.

kembali ditunda pada tanggal 23 Juni 2014 untuk kepentingan konsultasi.<sup>57</sup> Tujuan utama dari pelaksanaan konsultasi tersebut adalah untuk mencatat kemajuan, tantangan dan rencana kedepan khususnya terkait implementasi resolusi yang dihasilkan melalui pertemuan *IGAD Assembly Heads of State and Government Summit* pada tanggal 10 Juni 2014. Resolusi ini berisi komitmen yang dibuat oleh Salva Kiir dan Riek Machar untuk mengakhiri perang yang terjadi dan membentuk TgoNu.

*The envoys* melakukan konsultasi ekstensif di Addis Ababa, Nairobi, Juba dimana mereka bertemu dan mengadakan diskusi dengan para pemimpin pihak yang terlibat konflik, yakni presiden Sudan Selatan dan ketua kelompok SPLM/A. *The envoys* menyelenggarakan pertemuan konsultatif dengan para delegasi pemegang kepentingan yang terlibat dalam proses perdamaian (mediasi) diantaranya Pemerintah Sudan Selatan, SPLM/A, SPLM, partai politik, kelompok organisasi masyarakat, dan kelompok berbasis keagamaan.

Agenda sesi selanjutnya adalah untuk memfinalisasi dan menandatangani matrix CoH dan negosiasi terkait detail TgoNU. Bukan hanya melakukan konsultasi dengan berbagai pihak tersebut diatas, *special envoys* juga akan menindaklanjuti operasionalisasi MVM sesuai dengan resolusi DK PBB 2155. IGAD dan mitra internasionalnya akan dengan cepat menerapkan resolusi DK PBB 2155 bersama *regional protection force* dengan mandat baru untuk melindungi warga sipil, memperkuat MVM dan memastikan akses kemanusiaan tanpa hambatan serta perlindungan terhadap koridor bantuan kemanusiaan.

---

<sup>57</sup>*Multi Stakeholder South Sudan Peace Talks Adjourn for Consultations*. Diakses melalui [http://southsudan.igad.int/attachments/article/218/06\\_23\\_2014\\_Press%20Release%20-Multi-stakeholder%20roundtable%20talks%20for%20South%20Sudan%20adjourned%20for%20consultations.pdf](http://southsudan.igad.int/attachments/article/218/06_23_2014_Press%20Release%20-Multi-stakeholder%20roundtable%20talks%20for%20South%20Sudan%20adjourned%20for%20consultations.pdf) pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 1:24 WIB.

Selama proses mediasi, konflik antara pihak pemerintah dan oposisi di Sudan Selatan tetap berlangsung. Melalui *press release* dalam *website* resminya, IGAD *special envoys* menyayangkan adanya serangan di Nasir yang dilakukan oleh SPLM/A *In-Opposition*.<sup>58</sup> Bukan hanya serangan di Nasir, konflik berat juga tetap terjadi di Bentiu selama proses mediasi berlangsung. Bahkan serangan dan konflik yang terjadi di wilayah Bentiu juga mengakibatkan tewasnya salah satu tim pemantau MVM. Akibat dari serangan dan konflik yang terus berlangsung di berbagai wilayah Sudan Selatan, *the special envoys* mengulangi pernyataan yang ada dalam *rededication* dan implelementasi perjanjian CoH yang ditandatangani oleh pemerintah Sudan Selatan dan SPLM/A pada tanggal 23 Januari 2013 dan kembali ditandatangani pada tanggal 25 Agustus 2014 di Addis Ababa menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Para pihak karena itu,

1. Setuju untuk melakukan rededikasi terhadap perjanjian CoH pada tanggal 23 Januari 2014 dan lebih lanjut setuju untuk mengimplementasikan perjanjian CoH yang sesuai dengan *Implementation Modalities for the Cessation of Hostilities Matrix*.
2. Setuju untuk mengimplementasikan semua aspek dari perjanjian CoH dan kesepakatan-kesepakatan lainnya yang dibuat pada kemudian hari.

Namun pertempuran kembali terjadi setelah penandatanganan *Implementation Matrix of the CoH* pada tanggal 25 Agustus 2014. Pertempuran

---

<sup>58</sup>*The IGAD Special Envoys Condemn the attack in Nasir by forces of the SPLM/A In Opposition*. Diakses melalui <http://southsudan.igad.int/attachments/article/259/Press%20Release%20--%2015%20August'14%20-%20IGAD%20Special%20Envoys%20Condemn%20fighting%20in%20Bentiu.pdf> pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 1:27 WIB

berlangsung antara pihak-pihak berkonflik di *Renk County* dan di area selatan kota Malakal di *Upper Nile State*. Merespon pertempuran yang kembali berlangsung, Seyoum mendesak para pihak yang berkonflik untuk menahan diri dari tindakan yang dapat mengganggu perdamaian. Justru para pihak yang berkonflik seharusnya memberi kesempatan untuk terciptanya kedamaian dalam meja perundingan. Seyoum juga mengingatkan para pihak yang berkonflik untuk mematuhi semua perjanjian yang telah ditandatangani terutama perjanjian CoH.

#### **4.5.3 Putaran Ketiga (Mediasi IGAD Plus)**

Setelah selama kurang lebih delapan belas bulan melakukan proses perundingan damai dan mediasi di Sudan Selatan, IGAD berusaha untuk membuat kedua belah pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan akhir.<sup>59</sup> Namun usaha IGAD ini gagal dan dihadapkan oleh tantangan yang muncul dari regional maupun dari kedua belah pihak yang berkonflik. Untuk mengatasi tantangan ini, IGAD kemudian diubah dan diperluas menjadi *IGAD Plus*. Mediasi Sudan Selatan tidak lagi hanya dipimpin oleh IGAD melainkan terdapat aktor-aktor internasional lainnya yang ikut terlibat, diantaranya Uni Afrika (AU), UN, China, Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa (EU), Norwegia, dan *IGAD Partners Forum* (IPF).<sup>60</sup>

Perubahan dan perluasan ini dilakukan agar IGAD mendapatkan dukungan dari aktor internasional lainnya yang lebih luas dalam proses mediasi di Sudan Selatan. Masyarakat internasional perlu mendukung terbentuknya strategi yang realistis dan *regionally-centered* untuk mengakhiri konflik yang berlangsung

---

<sup>59</sup>International Crisis Group. 2015. *South Sudan: Keeping Faith with the IGAD Peace Process*. Diakses melalui <https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/south-sudan/south-sudan-keeping-faith-igad-peace-process> pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 1:34 WIB.

<sup>60</sup>*Ibid.*

di Sudan Selatan. Hal tersebut dapat dicapai dengan mengkoordinasikan ancaman dan dorongan bagi kedua belah pihak yang berkonflik.

Terdapat tiga faktor utama yang kemudian menjadi batasan dan tantangan dari mediasi IGAD.<sup>61</sup> Pertama, adanya rivalitas dan pertarungan kekuasaan pada tingkat kawasan (regional). Kedua, sentralisasi pembuatan keputusan pada level kepala negara dan kurangnya institusionalisasi didalam IGAD. Ketiga, tantangan dalam memperluas proses perdamaian melampaui elit politik Sudan Selatan. IGAD merupakan forum yang penting keberadaannya untuk mengatur *balance of power* pada tingkat kawasan. Namun IGAD tetap memerlukan dukungan yang lebih tinggi dan luas dalam proses mediasi konflik Sudan Selatan. *IGAD Plus* seharusnya dapat menjadi alat pemersatu pihak-pihak yang terlibat dalam dinamika konflik Sudan Selatan. *IGAD Plus* juga menjadi jembatan antara pendekatan “*African Solution*” dengan keterlibatan masyarakat internasional yang lebih luas.

*IGAD Plus* diumumkan pada bulan Maret 2015, setelah IGAD memutuskan mengakhiri mediasi yang sudah dilakukan selama lima belas bulan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan yang diharapkan.<sup>62</sup> Dibentuknya *IGAD Plus* dalam proses mediasi Sudan Selatan dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, pihak-pihak yang berkonflik di Sudan Selatan tidak bersedia membuat kesepakatan tanpa adanya tekanan. Kedua, IGAD membutuhkan aktor internasional lainnya untuk memberikan tekanan yang diperlukan bagi kedua belah pihak yang berkonflik. *IGAD Plus* pun resmi diluncurkan pada pertengahan bulan Juni saat berlangsungnya *AU Summit*. Setelah peluncuran *IGAD Plus* secara

---

<sup>61</sup>*Ibid.*

<sup>62</sup>*Ibid.*

resmi, pada tanggal 24 Juni kedua belah pihak yang berkonflik menerima draft kesepakatan. Setelah draft kesepakatan diterima oleh kedua belah pihak, akan dilaksanakan periode konsultasi internal. Periode ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang berkonflik untuk membahas isu-isu tertentu dalam draft kesepakatan yang sudah diajukan sebelumnya.

Periode konsultasi ini dilakukan sampai pada akhirnya tanggal 17 Agustus 2015 perjanjian ARCSS disepakati dan difinalisasi dalam pertemuan *IGAD Plus summit*.<sup>63</sup> Jika pada mediasi sebelumnya IGAD membuat periode waktu *deadline* yang lebih panjang bagi kedua belah pihak, pada mediasi ini *IGAD Plus* menargetkan untuk membuat kedua belah pihak mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang pendek. Kesepakatan harus dicapai dalam waktu yang singkat mengingat konflik Sudan Selatan yang semakin sulit untuk diatasi ditambah lagi dengan adanya perpecahan dalam pihak-pihak yang berkonflik. Bukan hanya itu, konflik yang terjadi juga semakin menyebar ke berbagai wilayah, kondisi ekonomi yang semakin memburuk dan meningkatnya tensi pada tingkat kawasan.

Pada akhirnya, *IGAD Plus* berhasil membuat kedua belah pihak menandatangani dan menyepakati perjanjian ARCSS. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Agustus 2015 di Addis Ababa, Ethiopia kemudian resmi diratifikasi oleh *South Sudan National Legislative Assembly* pada tanggal 10 September 2015. Perjanjian ARCSS ini berisi tujuh poin kesepakatan, diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>*Ibid.*

<sup>64</sup>IGAD, ARCSS, Diakses melalui [https://unmiss.unmissions.org/sites/default/files/final\\_proposed\\_compromise\\_agreement\\_for\\_south\\_sudan\\_conflict.pdf](https://unmiss.unmissions.org/sites/default/files/final_proposed_compromise_agreement_for_south_sudan_conflict.pdf) pada tanggal 8 Maret 2018 pukul 15:46 WIB.



- *Transitional Government of National Unity of the Republic of South Sudan (TgoNU)*
- *Permanent Ceasefire and Transitional Security Arrangements*
- *Humanitarian Assistance and Reconstruction*
- *Resource, Economic and Financial Management Agreements*
- *Transitional Justice, Accountability, Reconciliation and Healing*
- *Parameters of Permanent Constitution*
- *Joint Monitoring and Evaluation Commission (JMEC)*

Puncak dari implementasi ARCSS terjadi pada tanggal 29 April 2016 dengan dibentuknya *Transitional Government of National Unity (TgoNU)*.<sup>65</sup> Pembentukan pemerintah transisi ini pun diikuti dengan kepulangan Riek Machar yang menghilang selama konflik berlangsung di Sudan Selatan. Namun, dengan kembalinya Riek Machar ke Juba dan pembentukan TgoNU konflik justru kembali terjadi dan mengalami eskalasi di Sudan Selatan. Pada tanggal 7 Juli 2016 kurang dari 48 jam sebelum kemerdekaan Sudan Selatan yang kelima konflik antara SPLMA-IG dan SPLMA-IO berlangsung di wilayah Juba.

Konflik ini kemudian menyebar ke berbagai wilayah lain di Sudan Selatan dan mengakibatkan banyak kerusakan, kerugian dan korban jiwa baik masyarakat sipil maupun pasukan bersenjata. Setelah konflik kembali mengalami eskalasi di Sudan Selatan, Riek Machar pun meninggalkan Sudan Selatan. Peristiwa ini kemudian menandai pecahnya TgoNu yang baru saja dibentuk sebagai bagian dari implementasi ARCSS. Hal ini pun menjadi tanda runtuhnya kesepakatan ARCSS

---

<sup>65</sup>Clayton Hazvinei Vhumbu, 2016., *Conflict Resurgence And The Agreement On The Resolution Of The Conflict In The Republic Of South Sudan: A Hurried And Imposed Peace Pact?*, *Op.cit.*

yang telah ditandatangani dan disepakati oleh kedua belah pihak pada tanggal 17 Agustus 2015.

Setelah pecahnya TgoNU dan gagalnya implementasi ARCSS, kemudian dibentuklah *High Level Revitalization Forum* (HLRF). Forum ini dibentuk dalam rangka melakukan revitalisasi terhadap perjanjian ARCSS.<sup>66</sup> Selain melakukan revitalisasi, forum ini juga dibentuk dengan tujuan untuk mengembalikan kondisi *permanent ceasefire* di Sudan Selatan, mengimplementasikan kembali perjanjian ARCSS secara penuh, dan juga melakukan revisi timeline jadwal implementasi yang lebih realistis khususnya terkait jadwal pelaksanaan pemilu demokratis pada akhir masa pemerintahan transisi. Berdasarkan pemberitaan terbaru, HLRF berhasil membuat kedua belah pihak yang berkonflik di Sudan Selatan menyepakati dan menandatangani *Agreement on Cessation of Hostilities* dan *Protection of Civilians and Humanitarian Access*.

---

<sup>66</sup>*High Level Revitalization Forum For The Resolution Of The Conflict In South Sudan Concluded With Signing Of An Agreement On Cessation Of Hostilities*. Diakses melalui <https://igad.int/programs/115-south-sudan-office/1731-high-level-revitalization-forum-agreement-on-cessation-of-hostilities-protection-of-civilians-and-humanitarian-access-republic-of-south-sudan> pada tanggal 11 Januari 2018 pukul 1:38 WIB.